

**PSIKOLOGI KEPEMIMPINAN DALAM
GERAKAN MAHASISWA KAMPUS 1970-AN
SEBAGAI GERAKAN KOREKSI DAN NURANI BANGSA**

Oleh:

H. HATTA ALBANIK

Staf Pengajar Pada Fakultas Psikologi
Universitas Padjadjaran – Bandung

Disampaikan pada:

”Leadership & Organization, Building on Success (BOS) “The College is Ours”.
International Association of Students in Agriculture and Related Sciences
(IAAS-INDONESIA, LC UNPAD)

Jatinangor, 14 April 2007

PSIKOLOGI KEPEMIMPINAN DALAM GERAKAN MAHASISWA KAMPUS 1970-AN SEBAGAI GERAKAN KOREKSI DAN NURANI BANGSA

Pendahuluan

Sejarah Indonesia modern telah menunjukkan bahwa generasi muda hampir selalu tampil sebagai penentu perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan bangsa. George McTurnan Kahin bahkan menggunakan penamaan 'Revolusi Kaum Muda' untuk menyebutkan pergerakan tokoh-tokoh yang mempelopori terjadinya perubahan yang melahirkan bangsa dan negara Indonesia modern. Setelah Indonesia merdeka, tampaknya gerakan kaum muda itu analog dengan perjuangan intelektual yang terjadi pada awal abad 20, dari tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Perubahan yang terjadi senantiasa ditentukan oleh kalangan muda kampus; mahasiswa.

Perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa Indonesia merdeka, umumnya berupa upaya untuk merobohkan kekuasaan rezim-rezim totaliter dan kediktatoran yang membawa kehidupan bangsa jatuh pada kondisi kritis yang dapat membawa kehancuran. Sejarah mencatat bahwa perubahan-perubahan besar berupa hancurnya kekuatan-kekuatan totaliter Soekarno maupun Soeharto dilakukan oleh kekuatan-kekuatan mahasiswa sebagai penentu-namun sayangnya kemudian di alih dalam proses-proses berikutnya oleh kekuatan pemegang kekuasaan baru yang cenderung juga berkembang jadi totaliter dan kediktatoran.

Tak dapat dipungkiri bahwa konsentrasi kampus-kampus perguruan tinggi yang menjadi basis gerakan-gerakan mahasiswa di Indonesia terdapat di kota-kota besar yang lebih dekan dengan suasana kehidupan modern sehingga cenderung juga sekaligus menjadi pusat-pusat pemikiran acant-garde bagi kemajuan kehidupan bangsa Indonesia modern. Sangat menarik untuk diamati bahwa kampus sebagai pusat kekuatan modernisasi dan kemajuan kehidupan bangsa harus selalu bersikap pendapat dengan kalangan kekuasaan yang tampaknya senantiasa menempatkan diri sebagai kekuatan konservatif yang selalu menolak gagasan pembaharuan untuk meningkatkan kehidupan serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Persis seperti posisi yang diambil penjajah

melawan kekuatan pergerakan kemerdekaan rakyat Indonesia dulu. Bahkan biarpun individu-individu pemegang kekuasaan itu pada mulanya juga adalah berasal dari lingkungan gerakan cendekiawankampus yang pernah seiring sejalan dalam upaya memperbaharui kehidupan bangsa. Namun serenta memegang kekuasaan negara, para tokoh itu lalu berubah perilaku menjadi berorientasi kekuasaan, bukan lagi berorientasi perjuangan bagi kepentingan bangsanya yang dulunya menjadi tema perjuangannya. Kekuasaan telah menelan perjuangannya.

Fenomena yang kita temukan sepertinya menunjukkan posisi gerakan-gerakan mahasiswa yang senantiasa menyalang kekuasaan para penguasa itu, menjadi kekuatan koreksi yang membawakan hati nurani masyarakat yang ditindas oleh orientasi kekuasaan yang telah disalahgunakan bagi kepentingan pribadi-pribadi pemegang kekuasaan itu yang bukan lagi berorientasi pada kepentingan kemajuan bangsa.

Dalam kondisi seperti itulah gerakan mahasiswa Bandung menempati posisinya yang strategis di tengah-tengah pergolakan korektif terhadap penguasa yang menzalimi rakyatnya sendiri, semata-mata untuk hasrat dan kepentingan kekuasaan. Kekuatan gerakan mahasiswa Bandung pada umumnya terletak pada posisinya yang apolitis, tidak bertujuan untuk pencapaian kekuasaan. Selalu menjadi pembuka gagasan guna pemecahan kebekuan, menimbulkan keberanian dalam melakukan upaya-upaya koreksi menyalang kekuatan kekuasaan. Seringkali gerakan mahasiswa Bandung tidak memunculkan tokoh dan lebih mengandalkan pada kekuatan gagasan. Bahkan, mereka seringkali tidak memperdulikan apakah gagasan itu diambil alih oleh gerakan nasional mahasiswa yang kemudian 'dipdntir' oleh praktisi-praktisi politik sebagai amunisi mereka dalam kompetisi kekuasaan.

Menarik untuk dicermati bahwa gerakan mahasiswa Indonesia berlangsung dari generasi ke generasi dalam situasi dan kondisi berbeda. Dengan tema dan tokoh yang berbeda-beda pula, namun seolah-olah memiliki suatu rentang garis benang merah. Garis benang sendiri selalu dekat dengan hati dan perasaan umumnya masyarakat dalam era dan zaman yang berbeda-beda itu, sehingga, walaupun mungkin secara nyata tidak terjadi komunikasi fisik langsung, terbuka maupun tertutup, serta modus gerakan yang mungkin berbeda-beda, tetapi ide dan tujuannya pada dasarnya adalah; kepentingan dan keinginan masyarakat luas. Karenanya, selama gerakan mahasiswa berada dalam jalur benang

merah yang sama, betapapun buruknya kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia, akan selalu dimungkinkan terjadinya perbaikan atau perubahan untuk memperbaiki keadilan semacam itu.

Gambaran Psikologi Gagasan 'Back to Campus'

Mahasiswa Bandung tahun 1970-an pada umumnya hidup dalam to campus. Setelah perjuangan mahasiswa 1966 berpartner dengan ABRI berhasil menggulingkan kekuasaan tirani Soekarno yang diujung kekuasaannya membawa bangsa Indonesia ke dalam kondisi kesejahteraan sangat buruk, ekonomi collapse yang membawa kebangkrutan dan kelaparan dimana-mana rakyat antri beras, minyak tanah, dan tekstil kualitas rendah-banyak bermain politik sehingga mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Lalu tumbuh, semacam sikap yang menganggap politik sebagai bidang keladi dari buruknya kondisi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Patut diingat bahwa pada zaman itu buruknya kondisi bangsa diindikasikan oleh mis-management pemerintahan dan korupsi yang merajalela. Pada waktu itu Indonesia sudah dianggap termasuk negara paling korup di dunia. Indonesia juga adalah negara pengimpor beras terbesar di dunia. Banyak dilanda bencana alam tanpa mampu diatasi dengan baik, dan mengalami berbagai hal buruk lainnya. Dan, yang dituding ketika itu sebagai kambing hitam, ialah terlapau dominannya pertimbangan-pertimbangan politik di atas pertimbangan-pertimbangan kesejahteraan rakyat, bahkan membahayakan keamanan-negara. Indonesia berada dalam situasi frontasi yang tak ada habis-habisnya. Ke luar. Konfrontasi dengan Belanda, kemudian dengan Malaysia, Inggris, Amerika, dan seterusnya yang disebut nekolim ke dalam; Konfrontasi antar kekuasaan-kekuatan politik yang berbasiskan konfrontasi kekuatan-kekuatan ideologi dan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Kepentingan-kepentingan politik seakan menjadi lebih penting daripada upaya mensejahterakan rakyat sebagai misi utama dari setiap negara yang ingin maju.

Politik dianggap sebagai panglima. Gagasan-gagasan back to campus juga muncul karena ada perasaan risih dari mainstream gerakan mahasiswa pada waktu itu akan kemungkinan terseretnya mahasiswa dalam arus politisi yang mulai diengani itu. Banyak tokoh-tokoh gerakan mahasiswa 1966 yang masuk dalam pusaran permainan politik sebagai imbas-mungkin juga sebagai hadiah atau reward atas keberhasilan mereka

menumbangkan Orde Soekarno. Di satu pihak enggan terhadap politik sebagai panglima, di lain pihak terus terlibat dalam aktivitas politik. Agar tidak menjadi korban politik, mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus terkemuka di Indonesia waktu itu tampak banyak yang terpesona pada fenomena yang dimunculkan oleh arus utama aspirasi mahasiswa Bandung dan Jakarta dengan gagasan *back to campus*. Tetapi, di kemudian hari banyak juga yang menyesalkan fenomena ini, karena tanpa disadari gagasan *back to campus* ternyata dimanfaatkan oleh partner terpercaya mahasiswa (baca: ABRI) dalam penggulingan Soekarno di tahun 1966, untuk menggiring mahasiswa kembali mengisi ruang-ruang aktivitas akademiknya di perguruan tinggi.

Memberikan kesempatan ABRI untuk dengan leluasa mengambil alih inisiatif kekuasaan pemerintahan bangsa dan negara secara monolit. Tidak terbersit sedikitpun pikiran pada waktu itu untuk mengasramakan kembali (*back to barrack*) ABRI dan menormalisasikan kekuasaan pemerintahan sipil negara. Orang seakan-akan melupakan bahwa masa Orde Soekarno untuk sebagian besar juga diisi oleh masa kekuasaan militeristis yang diintrodusir melalui pernyataan Soekarno (yang juga adalah Panglima Tertinggi ABRI pada 1959-an tentang negara dalam keadaan bahaya (SOB) yang pada hakikatnya adalah keadaan darurat militer. Melalui kondisi inilah sebagian besar fungsi-fungsi pemerintahan normal sipil diambil alih oleh kekuatan-kekuatan militer bersenjata. Pada waktu itu tanpa disadari Indonesia tercatat sebagai negara dengan anggaran kabinetnya yang banyak diisi kalangan militer.

Pada awalnya kekuatan mahasiswa masih menganggap sebagai suatu kewajaran bahwa kondisi kekacauan politik yang ditinggalkan pemberontakan G30S menimbulkan kondisi keamanan yang kurang memuaskan. Sehingga, banyak peluang dan dorongan bagi ABRI untuk mengisi kekosongan-kekosongan jabatan sipil yang segera ditempati karena belum berlangsungnya mekanisme demokrasi yang wajar sejak pemilihan umum pertama satu dasawarsa sebelumnya (pada tahun 1955). Namun hanya selang beberapa saat, pada tahun 1970-an kekuasaan tentara menjadi terlalu dominan dalam panggung politik kenegaraan Indonesia. Serta merta keadaan ini memunculkan eksekusi penyalahgunaan kekuasaan militer yang mereknisi ingatan terhadap pemerintahan darurat militer (SOB) yang pernah dialami oleh negara Indonesia dengan segala akibatnya. Ada tidaknya pengaruh dari semakin terbukanya wawasan dan komunikasi

dengan dunia luar-khususnya dengan Amerika Serikat pada era yang diramalkan oleh isu gerakan hak sipil warga negara ternyata juga menggugah kesadaran kalangan terdidik terhadap hak-hak dasar manusia sebagai warga dari suatu negara. Keberhasilan mengeliminir kekuatan komunitas yang dianggap menindas hak-hak warga negara untuk ditundukkan oleh kekuatan-kekuatan negara, harus dibarengi dengan tumbuhnya pula kesadaran akan pentingnya memperhatikan hak dan kesejahteraan warga dari suatu negara. Keadaan serba tidak boleh pada masa Orde Soekarno (misalnya tidak boleh mendengar musik Barat yang ngak-ngik-ngok, tak boleh cas-cis-cus berbahasa asing, tidak boleh mendengar siaran radio luar negeri, tidak boleh menonton film Amerika dan Inggris, tidak boleh bergaul akrab dengan orang asing, tidak boleh berbeda pendapat dengan pemerintah dan sebagainya) membuat orang kemudian seakan-akan mendapatkan kembali kebebasannya pada masa awal orde baru itu.

Akan tetapi, seiring dengan semakin menguatnya cengkeraman militer terhadap kekuasaan negara, ternyata sedikit demi sedikit kebebasan-kebebasan yang dimiliki itu semakin menghilang digantikan kembali oleh segala serba tidak boleh lagi. Hak-hak warga negara terasa semakin diindas. Kekuasaan negara semakin dibatasi dalam genggamannya lingkaran elitis tertentu yang umumnya dekat dengan ABRI dan Soeharto sebagai pimpinannya. Rambut gondrong dirazia, diskusi ilmiah disusupi intel tentara, rapat organisasi dibatasi oleh pelbagai perijinan. Kesannya menjadi seperti sama saja dengan pembatasan-pembatasan yang dibuat dimasa Soekarno dulu yang sebenarnya juga dilakukan oleh kekuasaan militernya. Mulailah muncul sikap kritis mahasiswa terhadap kondisi-kondisi eksekutif yang terjadi. Blamana kondisi back to campus semula seiring dengan kehendak ABRI dan kesadaran mahasiswa sendiri untuk menghindarkan diri terlibat terlampau jauh mencampuri permainan politik, maka perkembangan selanjutnya membawa mahasiswa dan ABRI berada dalam dua tubir yang saling berseberangan, tidak lagi seiring sejalan. Mahasiswa tetap mentabukan politik dan permainannya, sementara ABRI mulai asyik mengatur politik dan permainan itu dalam mengelola kekuasaan yang sudah dalam genggamannya. ABRI mengambil tempat sebagai panglima politik baru, dan pada waktu yang bersamaan memposisikan politik sebagai panglima suatu hal ciri pemerintahan Orde Soekarno yang dikatakannya totaliter.

Aktivitas gerakan mahasiswa Bandung pada era 1970-1974 berada dalam kondisi semacam ini: back to campus tetap menjadi mainstream-nya, rasa antipati terhadap politik dan segala permainannya juga tetap menjadi napasnya. Tetapi, kondisi sudah berubah. Melalui pemilihan umum kedua dalam sejarah Indonesia merdeka, pada tahun 1971, tentara berhasil mengukuhkan dominasinya dalam negara dan menempatkan institusi-institusi politik sebagai bagian dari etalase demokrasi negara Indonesia. Tidak ada usaha untuk menyadarkan publik bahwa seiring dengan back to campus-nya mahasiswa, seharusnya tentara pun segera back to barrack dan keduanya kembali ber'partnership' mendorong demokrasi dengan memfungsikan mekanisme demokrasi, mendorong berperannya tokoh-tokoh profesional yang berjiwa demokrat dan bersama-sama melakukan tugas korektif mengawasi jalannya negara agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

"Partnership" Kampus dan ABRI

Terlampau dominannya ABRI dalam kekuatan negara menyebabkan tidak mungkin dilakukan pengawasan efektif terhadap para penyenggara negara, karena setiap upaya korektif yang dilakukan akan selalu dihadapi dengan kekuatan bersenjata militer yang menjadi pengawal kekuasaan penguasa pemerintahan negara. Orientasi dan totaliterismelah yang kemudian terjadi. Upaya korektif terhadap penyelenggara negara hanya mungkin efektif bila dilakukan melalui kekuatan pemikiran (baca:kampus/intelektual/mahasiswa) yang berpartner dengan kekuatan efektif bersenjata (baca: ABRI). Sehingga, pressure dan wibawa dari koreksi yang dilakukan itu akan membuat para penyelenggara atau pelaksana kekuasaan negara itu (baca: pemerintah/eksekutif dan suprastrukturnya) terawasi dan benar-benar harus jujur melaksanakan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara bagi kepentingan bangsa. ABRI dan mahasiswa sebagaimana telah terbukti dalam partnership-nya di tahun 1966-an itu menempatkan diri dalam posisi bersama rakyat yang mengoreksi carut marut kezaliman yang diperbuat oleh penyelenggara negara yang curang pada waktu itu. Namun, sayangnya Soeharto menyeret ABRI terlalu jauh masuk dalam pengaruh kekuasaan sehingga tanpa terasa semakin jauh dari rakyat. Banyak petinggi ABRI yang masuk dalam posisi kekuasaan Soeharto kemudian bertingkah laku sebagai Gubernur

Jenderal yang kejam dan korupnya melebihi Gubernur Jenderal Daendels. Dan, kondisi ini berlangsung tidak dalam sifatnya yang temporer, melainkan berlangsung seakan-akan dipermanenkan. Sehingga generasi penerus ABRI hampir-hampir tidak peka terhadap kondisi yang menyebabkan mengapa ABRI harus mengambil peran sipil didalam suatu negara demokrasi. Para seniornya dari angkatan 45 mungkin lebih mudah memahami kondisi kesementaraan 'darurat militer' di negara demokrasi itu. Tetapi, larutnya mereka dalam arus kenikmatan kekuasaan, menyebabkan mereka pun terjebak dalam kepentingan jangka pendek dan meneriakkan jargon 'dwi fungsi ABRI abadi untuk selamanya'. Jargon inilah yang ditelan dan diteruskan oleh generasi penerusnya secara tidak sensitif jengan bertingkah laku lebih keja dan lebih korup daripada Gubernur Jenderal VOC penjajah Belanda. Itu dimungkinkan oleh karena Soeharto berlangsung terlalu lama memegang kekuasaan dengan menyeret ABRI ke dalam pengaruh kekuasaannya. Menurut kalangan 45 yang kritis, kalangan ABRI yang dididik dalam tradisi pendidikan fasisme militer Jepang yang menjajah Indonesia secara kejam pada 1942-1945 itulah yang berhasil diseret Soeharto untuk mendukung kekuasaannya selama itu. ABRI yang berasal dari kalangan Angkatan 45 dan terdidik dalam suasana pergerakan kemerdekaan yang berlangsung secara terorganisir melawan penjajah Belanda (baca:kalangan ABRI pergerakan) pada umumnya berusaha menghindar bahkan cenderung bersikap kritis terhadap kekuasaan Soeharto. Kalangan inilah yang tampaknya bisa 'sehati' dengan pergerakan mahasiswa yang tidak pernah berhenti mengkritisi pemerintah (termasuk pemerintahan Orde Soeharto yang bersal dari partnership-nya dengan mahasiswa 1966). Sementara, kalangan ABRI yang berhasil diseret Soeharto menjadi alatnya lebih menempatkan diri sebagai 'penindas' terhadap sikap-sikap kritis mahasiswa yang senantiasa berupaya mengawasi pemerintahan agar tidak menindas serta membodohkan rakyat. Karena periode pemerintahan Orde Soeharto berlangsung begitu lama, maka masa bakti kalangan ABRI Angkatan 45 yang 'sehati' itu menjadi sedemikian singkatnya 'ber-partnership' dengan gerakan mahasiswa yang selalu menjaga kedekatan hati dengan nasib bangsanya. Sehingga kemudian, sebagian besar wajah ABRI Orde Soeharto lebih banyak diisi oleh wajah pengusaha korup yang menindas rakyat serta gerakan mahasiswa.

Wajah seperti inilah yang kemudian diestafetkan oleh kalangan generasi penerus kepemimpinan ABRI sebagai sikap dan perilakunya terhadap rakyat dan bangsa (serta

mahasiswa yang hampir selalu berada dalam posisi 'dekat' dengan hati rakyat dan bangsanya itu). Wajah kekuasaan dengan sikap dan perilaku menindas rakyat, bangsa dan pergerakan mahasiswa. Tidak pelak bilamana di dalam hati masyarakat semakin tumbuh perasaan tidak lagi memandang ABRI sebagai aset nasional yang berguna bagi kehidupan bangsa Indonesia yang demokratis. Tetapi lebih sebagai penidas dan unsur antidemokrasi yang selalu mengintai kesempatan untuk lebih menindas lagi dengan terjun mendominasi kekuasaan negara. Bukan untuk memajukan bangsa melainkan menikmati kekuasaan demi kepentingan kebmpoknya sendiri (baca: oknum-oknum pemegang kekuasaan di ABRI). Perilaku ini semakin terestafet turun temurun dari generasi ke generasi ABRI baru. Itu berarti, kekuatan ABRI, pemikiran agar melakukan lebih perlawanan kuat dari seluruh bangsa akibat kesan penjajahan dan pendudukannya akan membangkitkan soliditas perlawanan terhadap 'kekejaman penjajah'. Kekuatan demikrasi dalam mekanise negara harus mampu mengontrol ABRI supaya tidak keluar dari area fungsinya menjaga keamanan rakyat, bangsa dan negara. Sensiif bilamana ABRI memasuki wilayah kekuasaan pubik dengan menggunakan seragam dan menodongkan senjatanya mencampuri urusan-urusan masyarakat dalam tertib sipil. ABRI dan sipil memang tidak boleh dipertentangkan. Namun, itu hanya terjadi bilamana ABRI berada dalam koridor fungsinya sesuai konstitusi negara dan tidak ergoda untuk keluar dari fungsi itu dengan alasan apapun. Kalau tindakannya terdapat rakyat dan kekuatan sipil menampilkan perilaku kejam dan menindas, maka harus segera ikoreksi oleh mekanisme dan prosedur kekuasaan negara karena itu telah betentangan dengan fungsinya. Penindakannya tidak boleh diserahkan kepada mekanisme intern mereka sendiri, karena hal itu berarti menempatkan aturan yang merka buat untuk lingkungannya sendiri sebagai lebih tinggi dari aturan negara. Tetapi, harus lingkungannya sendiri sebagai lebih tinggi dari aturan-aturan negara), karena tindakan itu sudah menyangkut perampasan hak-hak sipil, menindas hak-hak sipil dan karenanya harus dihukum sesuai dengan aturan-aturan sipil,. Jadi kekejaman terhadap warga negara yang dilakukan tentara tidak bisa mereka lindungi dengan aturan yang mereka buat sendiri lalu mengatakan telah dilakukan sesuai prosedur yang mereka buat sendiri. Seakan-akan prosedur dan aturan mereka itu tidak bisa dimasuki oleh undang-undang dan aturan negara.

Rakyat dan bangsa Indonesia, karenanya harus peka bilamana aturan dan undang-undang itu dibuat atau diusulkan oleh ABRI sendiri, dengan anggapan mereka lebih ahli dalam bidangnya. Kemalasan dan keengganan berpikir semacam inilah yang membuat bangsa dan negara Indonesia seringkali kecolongan sehingga melahirkan banyak aturan-aturan negara yang kemudian mencekik negara dan menguntungkan satu kelompok kepentingan saja. Produk undang-undang 'ketengan' semacam ini banyak dihasilkan oleh inflasi undang-undang di masa pemerintahan Presiden Habibie (yang berkolaborasi dengan DPR/MPR-nya Harmoko cs) sehingga menyulitkan kontrol publik terhadap kekuasaan kripto-mania yang menganggangi aset-aset milik publik, membuat negara dalam negara yang dikuasai para kripto-mania tersebut. Lihat saja UU Bank Indonesia, aturan-aturan tentang BPPN, UU tentang Mahkamah Agung, UU tentang Kejaksaan, UU Kepolisian, UU tentang Perpajakan dan lain-lain. Semua UU itu bertujuan untuk mengontrol dan menguasai publik dan memberikan tempat sangat sempit untuk kontrol publik. UU Kepolisian misalnya, telah menempatkan kepolisian sebagai suatu 'kekuatan' baru yang jauh lebih besar kekuatannya daripada masa sebelumnya, namun tidak memberi celah kepada kontrol publik. Sehingga bukan mustahil pada waktunya kepolisian akan mengulangi perilaku tentara tatkala memegang kekuasaan besar di tangannya. Kecemasan seperti ini ada dasarnya karena catatan empiris memperlihatkan terjadinya beberapa tindakan brutal aparat kepolisian sebagai aparat kekuasaan dalam menghadapi masyarakat pada beberapa tahun terakhir dan pada akhir-akhir ini, termasuk dalam menghadapi gerakan-gerakan kritis mahasiswa. Ada sejumlah catatan yang memperkuat dasar kecemasan itu: Mulai dari Peristiwa 6 Oktober 1970, kasus Sum Kuning, kasus wartawan Udin di Yogya, penanganan kasus-kasus yang tak tertuntaskan seperti pembunuhan peragawati Dietje hingga buruh wanita Masinah, peristiwa Semanggi serta kebrutalan menghadapi demo di depan Mahkamah Agung 12 Februari 2004.

Anatomi Psikologi Gerakan Mahasiswa Bandung 1970-An

'Mainstream' kondisi mahasiswa di Bandung tahun 1970-an yang ditandai semangat back to campus mengarah kepada mentabukan politik yang penuh permainan dan mengarah kepada sikap apolitis yang bahkan cenderung kepada depolitisasi. Tambah

lagi dengan sikap antipati terhadap sejumlah tokoh mahasiswa 1966 yang senang bermaik politi, tetapi kemampuan akademiknya ternyata nol besar. Banyak aktivitas mahasiswa Bandung pada waktu itu, terutama aktivitas 1966, kesiangan, yang dianggap sebagai mahasiswa abadi yang tidak memiliki prestasi akademik, tidak bernalar dalam argumentasi, suka pamer jasa dan kekuasaan, bahkan seringkali dinilai atau terbukti sering memerah pengusaha-pengusaha warga China dengan alasan untuk mengumpulkan dana perjuangan. Di lingkungan kampus Universitas Padjadjaran misalnya dikenal aktivis-aktivis mahasiswa semacam itu yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi Liga Film Mahasiswa, mobil VW DPR, korupsi DM Unpad, kasus Biro Pers Mahasiswa, kasus peminjaan inventaris Dewan Mahasiswa untuk kepentingan salah satu organisasi mahasiswa Islam, dan lain sebagainya. Di ITB muncul bau korupsi dalam penyelenggaraan komersialisasi kegiatan-kegiatan pengumpulan dana penyelenggaraan event mahasiswa, pemilihan Miss University dan sebagainya. Timbul semacam koreksi internal yang ditujukan kepada figur-figur tokoh sisa-sisa Angkatan 66 yang telah menjadi semacam pahlawan kesiangan dan tidak lagi menampilkan perilaku kepemimpinan yang populer serta terpuji di mata para juniornya mahasiswa tahun 1970-an itu. Muncul semacam idola baru dari tokoh mahasiswa 1970-an yaitu mahasiswa yang cerdas, baik potensi akademiknya, apolitis, 'luga' dan berani. Tokoh-tokoh Angkatan 66 terutama yang terjun ke dalam gelanngang politik elalui Pemilihan Umum 1971 untuk sebagian dianggap sebagai tokoh-tokoh avonturir dengan reputasi akademik yang buruk, namun masih terus menampilkan diri sebagai representan mahasiswa kampus. Melalui usaha-usaha konstitusional seperti perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan mahasiswa intra unversiter masing-masing dilakukanlah pembatasan-pembatasan. Misalnya, untuk duduk sebagai pengurus organisasi mahasiswa intra universiter tidak diperbolehkan bagi para mahasiswa yang lebih dari 6 tahun terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan. Masa jabatan kepengurusan dibatasi hanya sampai dengan 1 atau 2 tahun. Nilai akademiknya dianggap memadai, tidak dikenal sebagai mahasiswa yang bodoh, dan sebagainya.

Ada kecenderungan penilaian bahwa tokoh-tokoh mahasiswa 1966 sudah mulai lembek terhadap kekuasaan Orde Baru, tidak lagi kritis terhadap kekeliruan-kekeliruan yang dibuat oleh pemerintahan Soeharto, tidak idealis lagi, dan mulai meninggalkan

tradisi-tradisi kecendekiawanan gerakan-gerakan mahasiswa. Masih ada sedikit respek terhadap segelintir tokoh gerakan mahasiswa 1966 mau dan mampu berkomunikasi intensif karena dinilai dapat tetap memelihara integritas dan idealisme mahasiswa. Tetapi, tokoh-tokoh semacam ini biasanya adalah mereka yang justru dimusuhi oleh kekuatan kekuasaan pemerintahan Orde Soeharto. Menarik untuk dicermati bahwa mainstream aktivis mahasiswa Bandung tahun 1970-1974 ini banyak yang dikenal dan tumbuh murni dari lingkungan intra kampus, tidak terkait dalam kegiatan-kegiatan organisasi ekstra universitas secara intensif dan karenanya bobot kegiatan kemahasiswaannya cenderung lebih bercirikan mahasiswa intra kampus yang tidak begitu suka pada jabatan dan kegiatan politik. Pada umumnya mereka lebih senang terlibat dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian daripada kegiatan-kegiatan berbau politik apalagi berorientasi pada jabatan dan kekuasaan. Berorganisasi dianggap sebagai bagian dari usaha untuk mengembangkan kepribadian, lebih mematangkan potensi-potensi kepemimpinan yang diperlukan bagi penerapan kemampuan akademik yang dimilikinya, agar dapat lebih diamankan setelah menyelesaikan studi dan terjun ke masyarakat. Tidak heran bila ternyata kelak sedikit sekali kalangan tokoh-tokoh mahasiswa era ini yang muncul sebagai tokoh dalam jabatan-jabatan politik. Sebagian besar di antara mereka justru terjun dalam bidang-bidang pengabdian yang tidak vokal, uncovered, serta jauh dari upaya-upaya untuk menonjolkan diri dan mencari popularitas.

Era ini ditandai oleh berlangsung cepatnya silih berganti proses regenerasi kepemimpinan mahasiswa yang semakin melepaskan diri, independen dan berjarak dari senior-seniornya di era tahun 1966. di ITB muncul banyak tokoh pimpinan dewan mahasiswa yang berasal dari generasi yang pada waktu peristiwa 1966 masih duduk di bangku SMP atau SMA dan terlibat dalam peristiwa 1966 bukan sebagai tokoh kesatuan aksi pelajar, bahkan mungkin hanya ikut-ikutan saja. Melalui keaktifan mereka dalam kegiatan intra kampus seperti grup belajar (tentieren grup), olahraga, kesenian, bahkan kelompok les dansa ballroom, berhasil melontarkan mereka ke tangga tokoh dan pimpinan organisasi dewan mahasiswa. Sebaliknya, mereka yang lebih banyak aktif dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar kampus dianggap berada dalam lingkaran politik ideologi dan tidak populer serta seringkali dijauhi dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian mahasiswa di dalam kampus. Mereka dianggap berada di luar mainstream

tokoh mahasiswa kampus. Mahasiswa lebih berorientasi inward looking daripada outward looking. Relasi-relasi yang dibangun dengan kalangan luar kampus yang sehati dengan gerakan mahasiswa 1966, pada era ini seakan mulai ditinggalkan. Back to campus membuat mereka lebih disibukkan hanya oleh kegiatan-kegiatan kemahasiswaan sebagai penuntut ilmu di kampus, eksklusif, seakan dekat dengan gaya hidup mahasiswa 'normal' era sebelum 1965-1966, yaitu era mahasiswa tahun 50-an yang hidup dengan semboyan perilaku: buku, pesta, dan cinta.

Namun, masa inward looking 'back to campus' yang eksklusif itu ternyata tidak bisa berlangsung lama. Serenta mereka masuk dan duduk sebagai pimpinan student government kapusnya (istilah monumental dalam pergerakan mahasiswa intra kampus di Indonesia untuk menunjukkan kemerdekaan dan independensi yang kuat dari mahasiswa kampus sehingga mampu menyelenggarakan 'pemerintahan'nya sendiri, bebas dari pengaruh-pengaruh kekuatan lain di luar mahasiswa) tokoh-tokoh mahasiswa pimpinan student government itu menghadapi satu situasi 'baru'. Mereka dihadapkan pada tuntutan permintaan dan aduan yang datang dari masyarakat luas melalui pelbagai jalur komunikasi formal maupun informal akan adanya masalah-masalah social yang ditimbulkan oleh tindak perbuatan penguasa Orde Soeharto dalam bentuknya yang tidak terpuji. Mulai menunjukkan terjadinya penyimpangan idealisme perjuangan awal Orde Baru yang semula ingin mengoreksi kesalahan-kesalahan Orde Lama. Pengaduan dari pelajar yang dalam perjalanan ke sekolah menjadi korban razia rambut gondrong atau rokok ketat. Pengaduan pengusahapengusaha pribumi yang usaha industry tekstil tradisionalnya digusur dan tenam bangkrut oleh masuknya modal-modal besar menggantikan usaha-usaha tradisional tanpa ada usaha pemerintah meningkatkan kemampuan industri-industri tradisional itu. Pengaduan pengusaha-pengusaha minuman ringan yang gulung tikar karena masuknya para pemodal besar multinasional. Pengaduan pengusaha-pengusaha kecil pribumi dan menengah yang diperlakukan tidak adil dalam penyaluran kredit perbankan akibat persekongkolan para bankir dengan pengusaha nonpri, yang di-backing oleh orang-orang di dalam kekuasaan. Pengaduan dari buruh atau karyawan perusahaan modal asing Jepang dan pengusaha nonpri, karena mendapat perlakuan perlakuan diskriminatif dalam pengupahan, karier dan fasilitas. Pengaduan dari korban-korban banjir Ciamis (yang pada waktu itu terjadi hampir setiap tahun) akan

korupsi dalam penyaluran bantuan sosial yang diberikan pada mereka. Bahkan pengaduan dosen yang rumah VB-nya digusur oleh oknum militer yang bekerjasama dengan dinas perumahan dan pengusaha non-pri.

Pada mulanya mereka masih mampu menahan diri untuk tidak melibatkan diri dalam 'kegiatan politik' yang merespon hal itu. Respon lebih banyak dilakukan oleh kalangan non kampus melalui cara-cara bergaya mahasiswa Angkatan 66: aksi demonstrasi, publikasi, dan lain sebagainya. Mereka belum mau bereaksi dengan modus semacam itu. Terus berusaha menemukan modus dan cara lain yang berbau 1966. Tetapi, belum sempat menemukan modus dan cara yang 'sreg', mereka dipaksa harus segera bereaksi, karena dengan cepatnya para penguasa telah menjadikan mereka sebagai sasaran langsung dari perilaku 'mabuk-kekuasaan'-nya tentara, yang selalu memerlukan 'musuh' baru untuk ditempatkan sebagai lawan yang harus dilenyapkan.

Dalam pada itu, kenyataan objektif yang dipersepsikan sehari-hari melalui pergulatan hidup di tengah-tengah masyarakat, pergulatan dengan pengalaman hidup di tengah-tengah masyarakat, pergulatan dengan pengalaman hidup sehari-hari, diperkaya dengan observasi, analisa dan diskusi sebagai tradisi alam kehidupan kampus, mau tidak mau menimbulkan pula suatu keinginan untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang menyimpang itu sebagai masukan bagi kalangan berwenang melalui forum dan media yang memungkinkan untuk itu. Sayangnya, pemerintah Orde Soeharto zaman itu pada hampir seluruh tingkatan jajarannya sudah mulai menutup komunikasi bagi kemungkinan memandang hal-hal semacam itu sebagai masukan untuk melakukan perbaikan. Masukan semacam itu dengan segera dianggap sebagai kritik yang tidak membangun, dianggap tidak berpartisipasi dalam pembangunan, oposisi yang tidak bertanggung jawab, bahkan mulai dipojokkan sebagai usaha menentang kepemimpinan Orde Baru. Usaha-usaha ini dengan serta merta pula diikuti oleh operasi intelejen yang disusul operasi militer untuk memerangi musuh-musuh Orde Soeharto. Dialog menjadi suatu keniscayaan sehingga komunikasi dua arah tidak lagi terjadi. Pemerintahan Orde Soeharto berikut seluruh jajaran ordennya mulai melihat kegiatan kemahasiswaan sebagai kegiatan yang harus ditumpas berikutnya setelah kekuatan PKI dan G30S-nya. Dengan demikian, tokoh-tokoh mahasiswa tahun 1970-1974 yang semula bersikap apolitis kemudian digiring menjadi musuh politik, didesak dan didorong masuk ke dalam ring politik, bukan lagi sebagai

partner melainkan sebagai musuh. Mahasiswa dijadikan bulan-bulanan dari semua frustrasi dan kegagalan yang ditimbulkan oleh penyimpangan perilaku politik dari Orde Soeharto. Mulai dari tuduhan urakan, kebarat-baratan, sarang subversi, hingga new left dan istilah-istilah seram lainnya. Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud pada waktu itu bahkan menuding perguruan tinggi-tempat dimana putra-putrinya notabene juga mengikuti pendidikan-sebagai sarang subversi, bahkan melarang dilakukannya penelitian-penelitian ilmiah oleh perguruan tinggi serta lembaga-lembaga penelitian ilmiah lainnya-untuk mengumpulkan data-data penelitian dari masyarakat. Kasus pelanggaran PT Suburi merupakan salah satu contoh. Saat itu awal mulai diberlakukannya izin-izin untuk penelitian ilmiah di Indonesia. Suatu hal yang hanya dapat terjadi di dalam system masyarakat negara-negara komunis totaliter pada waktu itu.

Psikologi Mahasiswa Menentang Tirani Militer

Perlawanan mulai muncul karena mahasiswa dan kalangan cendekiawan kampus tidak mau diperlakukan dengan tindakan anti-intelektual. Mahasiswa 1970-1974 menjadi harus taktis mengatasi ancaman-ancaman semacam itu. Mau tidak mau pikiran dan perbuatan bertendensi politik kekuasaan itu harus pula dilawan. Tentunya dengan konsep, pikiran dan tindakan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang sempat mereka miliki. Alih-alih berusaha mendalami profesi dan keilmuan untuk persiapan masa depan mereka membangun bangsanya, kini mereka terpaksa harus mengurangi kadar back to campus-nya untuk turun gunung sebelum putus ajar, kembali berjuang melawan tirani baru: Soeharto.

Waktu itu, sebagian besar mahasiswa dari organisasi ekstra kampus masih melanjutkan bulan madu partnership-nya dengan kalangan penguasa Orde Soeharto. Banyak di antara mereka yang dianggap masih di'atur' oleh tokoh-tokoh mahasiswa 66 yang terjun ke dalam permainan politik, bahkan direkrut sebagai agen-agen intelejen tentara serta kekuatan-kekuatan penguasa Orde Soeharto lainnya. Organisasi ekstra universitas kala itu dianggap sudah tidak lagi murni memperjuangkan idealism mahasiswa yang berbasiskan kepentingan hati nurani rakyat. Bahkan bubarnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) terjadi karena perbenturan kepentingan dari organisasi-organisasi mahasiswa ekstra yang semula bersatu sebagai pendukung

organisasi KAMI. Benturan terutama terjadi karena organisasi-organisasi mahasiswa ekstra itu bahkan kembali kepada basis-basis ideology politik mereka semula. Dimasa Orde Soekarno banyak partai politik yang mendirikan organisasi-organisasi onderbouw di kalangan mahasiswa untuk menanamkan pengaruh ideology politik yang mereka anut itu pada generasi muda intelektual mahasiswa. Di antaranya, sudah tak asing lagi bagaimana sebagian besar universitas-universitas negeri terkemuka banyak yang dipengaruhi oleh organisasi-organisasi mahasiswa ekstra seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Sementara, kampus-kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada waktu itu ditengahi sebagai basis dari pengaruh organisasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Banyak perguruan tinggi swasta yang berafiliasi dengan partai-partai politik Katolik dan Kristen lalu juga menjadi basis pengaruh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), jangan lupa pula pengaruh dari organisasi-organisasi mahasiswa yang kebanyakan beranggotakan kalangan nonpri keturunan China yang kekiri-kirian, yang bahkan menolak upaya-upaya pembauran dengan menuntut menjadi kelompok etnis tersendiri, sebagai organisasi yang berbasiskan ideology yang mempertahankan semata-mata kebhinnekaan dan sedikit sekali upaya untuk menemukan keekaan. Wajar bila aktivitas kegiatannya lebih banyak berorientasikan kepentingan ideology politik, yang untuk mempertahankan eksistensinya seringkali melakukan manuver-manuver politik dengan mempertajam perbedaan-perbedaan yang mereka miliki (divergensi) dan hampir sama sekali tidak berorientasikan konvergensi, mencari kesamaan yang memungkinkan terjadinya pembauran gagasan.

Kebersamaan di dalam KAMI ternyata lebih didasarkan pada kepentingan-kepentingan jangka pendek untuk menumpas PKI sebagai musuh bersama yang terlanjut dengan upaya-upaya menggulingkan Soekarno yang dianggap terlalu melindungi PKI. Dengan keberhasilan meruntuhkan kekuasaan Orde Soekarno, organisasi ekstra kampus yang dimasa Orde Soekarno juga saling bertarung memperebutkan hegemoni dan menguasai kampus-kampus perguruan tinggi terkemuka di Indonesia kembali melanjutkan pertempuran di antara mereka yang sempat jeda sejenak sewaktu mereka bisa berkumpul bersama dalam waktu singkat di dalam organisasi perjuangan KAMI.

Organisasi KAMI sendiri terbentuk cukup unik melalui prakarsa ABRI di dalam pemerintahan Kabinet Soekarno diinspirasi dari Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yaitu organisasi yang menghimpun dalam satu wadah federasi organisasi-organisasi mahasiswa ekstra di Indonesia pada waktu itu. Organisasi-organisasi intra kampus ketika itu pun dihimpun dalam suatu organisasi yang diberi nama Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI). Dalam kenyataannya waktu itu, kekuasaan di dalam MMI hampir sepenuhnya ditentukan oleh pergulatan dan kompetensi hegemoni yang berlangsung di antara organisasi-organisasi ekstra kampus yang bernaung di dalam PPMI. Entah mengapa organisasi PPMI maupun MMI ternyata berhasil didominasi oleh kekuatan CGMI yang menjadi onderbouw PKI, HMI yang dituding oleh Orde Soekarno sebagai onderbouw dari partai terlarang Masjumi, serta GMNI yang menjadi onderbouw dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang kala itu dituduh dikuasai oleh kekuatan ideology kekiri-kirian bahkan dituduh disusupi komunis.

Pada masa awal perjuangan Angkatan 66, konstelasi ini kemudian berubah dengan tersingkirnya kekuatan-kekuatan yang dianggap dekat dengan PKI pada waktu itu (mungkin juga sampai kini?) dan dianggap sebagai dalang terjadinya pemberontakan G30S (suatu usaha kudeta terhadap kekuatan pemerintahan yang sah waktu itu): CGMI plus GMNI. Dikalangan PNI pada waktu itu telah terjadi pula usaha pembersihan terhadap tokoh-tokoh PNI pimpinan oleh Ali Sastroamidjojo dan Ir Surachman yang dianggap bersimpati terhadap HKI. Terbentuklah GMNI 'aliran kanan' PNI yang dipimpin Osa Maliki dan Usep Ranawidjaja. GMNI dari aliran ini dianggap bisa bekerjasama dengan organisasi-organisasi ekstra kampus antikomunis dan menjadi kekuatan pendobrak awal dalam usaha ABRI di bawah pimpinan Soeharto dan AH Nasution untuk menggusur kekuatan Orde Soekarno melalui pembentukan KAMI. Pada mulanya KAMI hanya didukung oleh organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus antikomunis tersebut. Terlibatnya mahasiswa organisasi intra kampus terjadi oleh karena terdesaknya usaha-usaha pergerakan yang dilakukan KAMI dengan munculnya instruksi pemerintahan Orde Soekarno untuk membubarkan KAMI yang segera disusul instruksi Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I Soebandrio untuk membentuk barisan Soekarno sebagai pengimbang KAMI. Waktu itu terkenal semboyan 'teror harus dibalas dengan kontra teror'. Terdesaknya organisasi KAMI yang murni ekstra kampus itu kemudian

mendorong munculnya kebutuhan melibatkan mahasiswa secara keseluruhan di kampus-kampus perguruan tinggi untuk juga terlibat dan melibatkan diri dalam perjuangan menghancurkan dalang peristiwa kudeta G30S yang dianggap masih terlalu dilindungi oleh Soekarno. Bersamaan dengan munculnya konsulat-konsulat KAMI diperguruan-perguruan tinggi terkemuka di Indonesia pada waktu itu dan dilibatkannya pula massa pelajar SMP dan SMA di dalam organisasi KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), maka resminya para mahasiswa organisasi intra kampus ikut terlibat menjadi anggota KAMI. Semula gerakan intra kampus melakukan perlawanannya secara terpisah dari KAMI.

Dengan penggambaran di atas dapat dipahami mengapa pada tahun 1970-1974 gerakan back to campus lebih banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi intra kampus yang ingin kembali meninggalkan kegiatan politik untuk kembali melaksanakan fitrahnya sebagai mahasiswa yang harus melanjutkan studinya. Sementara, tokoh-tokoh mahasiswa pola pendidikan bebas tanpa batasan waktu studi organisasi ekstra kampus juga kembali pada fitrahnya sebagai politisi-politisi muda yang digerakkan oleh aliran ideology politiknya masing-masing. Tentunya kalangan organisasi mahasiswa ekstra kampus inilah yang sangat berkeberatan dengan terlaksananya gagasan back to campus. Terdorongnya kemudian tokoh-tokoh mahasiswa intra kampus ke dalam kegiatan politik kemudian, adalah karena mereka juga tidak tahan menghadapi penyimpangan-penyimpangan kekuasaan Orde Soeharto, lalu mengambil alih sikap-sikap kritis mahasiswa dan cendekiawan yang tak mungkin lagi dilakukan oleh tokoh-tokoh organisasi mahasiswa ekstra kampus yang semakin larut masuk ke dalam permainan politik kekuasaan Orde Soeharto. Keluar-kampusnya kegiatan-kegiatan mahasiswa intra kampus sebagian besar terjadi oleh karena semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat luas dan kalangan mahasiswa intra kampus terhadap permainan-permainan politik para tokoh organisasi ekstra kampus yang seringkali 'bermain mata' dengan politik kekuasaannya Orde Soeharto dan ABRI. Organisasi mahasiswa ekstra kampus tidak mungkin lagi berdiri di depan untuk mengkritisi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Soeharto.

Tokoh-tokoh organisasi ekstra kampus pada umumnya masih merupakan tokoh-tokoh gerakan mahasiswa 1966. Regenerasi pimpinan organisasi ekstra kampus ini

memang hampir tidak pernah berlangsung mulus. Banyak pimpinan organisasi mahasiswa ekstra kampus ini yang sebenarnya sudah bukan mahasiswa lagi, entah karena dropout (tidak dapat menyelesaikan studinya), entah karena telah lulus menjadi sarjana, tetapi masih terus mempertahankan statusnya sebagai pimpinan organisasi mahasiswa ekstra kampus. Banyak di antaranya yang dalam usia sudah tidak muda lagi (usia 30-40 bahkan lebih tua) masih mempertahankan statusnya itu. Sementara dikalangan organisasi intra kampus (khususnya pada perguruan-perguruan tinggi terkemuka) proses regenerasi pada tampuk kepemimpinannya berlangsung sangat cepat. Hampir tidak pernah ada pimpinan intra yang lebih dari dua periode menduduki jabatan puncak dalam organisasi mahasiswa intra kampus. Banyak diantara mereka berada dalam usia ideal bagi kebanyakan mahasiswa dalam system pendidikan pada waktu itu yaitu pada tingkat-tingkat akhir studinya dalam usia sekitar 24-27 tahun. Dalam usia-usia inilah mereka muncul sebagai tokoh pimpinan puncak organisasi mahasiswa intra kampus. Setelah 4-6 tahun menjadi mahasiswa dalam jangka waktu studi yang pada waktu itu dipatok oleh kurikulum pendidikan tinggi berlangsung selama 5-7 tahun (misalnya: kurikulum pendidikan sarjana pada waktu itu rata-rata 5 tahun untuk menjadi sarjana teknik/hukum/ekonomi/sosial, 6-7 tahun untuk pendidikan dokter, psikologi, apoteker), jangka waktu studi mahasiswa bisa molor menjadi satu setengah sampai dua kali jangka waktu studi yang ditetapkan oleh kurikulum. Sebagian besar terjadi karena masih belum efisiennya system pendidikan tinggi karena terbatasnya fasilitas prasarana pola pendidikan bebas tanpa batasan waktu studi agar mahasiswa mandiri dalam merancang studinya, dan lain sebagainya. Rata-rata usia mereka dalam masa gerakan mahasiswa 1966, baru berusia 17-19 tahun. Karenanya, keterlibatan dengan tokoh-tokoh gerakan 1966 pada umumnya cukup berjarak, sehingga sedikit sekali yang merasa memiliki keterkaitan emosional maupun intelektual. Pada waktu tokoh-tokoh gerakan mahasiswa 66 itu telah menyandang status mahasiswa, para tokoh mahasiswa intra kampus 1970-1974 itu masih belum menyandang status mahasiswa. Terdapat perbedaan usia sekitar 6-10 tahun. Tokoh-tokoh mahasiswa 66, pada umumnya jarang yang berhasil menjadi mahasiswa atau tokoh-tokoh mahasiswa intra kampus. Mereka umumnya menjadi 'generasi yang hilang' dalam estafet kepemimpinan mahasiswa kampus. Tidak sedikit di antara mereka yang sebenarnya seusia dan segenerasi dengan tokoh-tokoh pimpinan organisasi

mahasiswa intra itu, yang tidak melanjutkan studinya secara normal, tidak diterima dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi terkemuka, tidak serius studinya, terjun ke dunia politik mengikuti senior-seniornya tokoh-tokoh mahasiswa gerakan 66. Bahkan tidak sedikit yang menjadi avonturir politik mengotorkan kegiatan-kegiatan aksi mahasiswa intra kampus, sebagai demonstran bayaran, provokator, informan intelejen, komersialisme demonstran bayaran, provokator, informan intelejen, komersialisme demonstrasi, bisnis politik, dan lain sebagainya. Mereka kemudian menjadi fenomena tersendiri sebagai tokoh-tokoh ekstra kampus, bukan sebagai representasi formal mahasiswa kampus, tetapi tetap menyatakan diri sebagai aktivis gerakan ekstra (luar) kampus. Status kemahasiswaan merekapun seringkali tidak perlu dipermasalahkan karena mereka menyatakan diri sebagai aktivis non kampus.

Kali ini mahasiswa intra kampuslah yang mengambil alih kembali sikap kritis intelektual terhadap penyimpangan kekuasaan. Bisa dimaklumi bila di dalam era 1970-1974 ini kendali pergerakan mahasiswa intra kampus dalam mengkritisi penyimpangan-penyimpangan pemerintah Orde Soeharto banyak dilakukan tokoh-tokoh mahasiswa intra kampus yang independen dan berhasil melepaskan diri bahkan bersikap memusuhi sikap serta perilaku tokoh dan organisasi ekstra kampus seperti itu. Sementara, kampus-kampus perguruan tinggi yang organisasi intra kampusnya banyak dikendalikan oleh tokoh dan organisasi ekstra kampus semacam itu lebih banyak bersikap pasif, oportunistis dan mencari momentum aman serta tidak terbuka menyatakan sikap kritisnya. Organisasi ekstra kampus semacam inilah yang segera setelah peristiwa Malari 1974 meletus di Jakarta buru-buru menyatakan sikap menghujat gerakan mahasiswa 1974 dan menjilat kekuasaan pemerintahan Orde Soeharto untuk kemudian memperoleh konsesi politik bahkan konsesi ekonomi tertentu. Tampaknya organisasi-organisasi ekstra kampus itu tidak rela kendali kepemimpinan pergerakan mahasiswa dan kecendekiawanan di Indonesia diusung oleh gerakan-gerakan mahasiswa intra kampus.

Perjuangan mahasiswa 1970-1974 itu memang menjadi ternoda oleh kecerobohan yang dilakukan para mahasiswa intra kampus Jakarta yang terlalu banyak melibatkan tokoh-tokoh avonturir gerakan mahasiswa ekstra kampus. Disamping kurangnya sensitivitas terhadap kemungkinan begitu teganya suatu pemerintahan kekuasaan yang didukung secara populis dan demokratis serta selalu menyatakan diri memiliki

partnership dengan mahasiswa, memperlakukan anak bangsanya sendiri sebagai musuh yang harus ditumpas habis seperti mereka menumpas PKI dan Soekarno sebagai lawan politiknya. Dengan didudukinya kampus Universitas Indonesia oleh pasukan pendudukan milikiter, dimulailah suatu masa penindasan baru terhadap rakyat dan bangsa Indonesia yang bahkan tidak pernah dilakukan oleh pemerintah jajahan Belanda serta fasisme Jepang. Dan, bagaikan drakula yang sekali mengisap darah kemudian semakin menikmati sedapnya darah, demikianlah kemudian terjadi penindasan demi penindasan terhadap rakyat Indonesia yang semakin lama menjadi semakin berdarah-darah tanpa sedikit pun rasa salah dan penyesalan, dilakukan oleh petinggi-petinggi ABRI. Pendudukan kampus yang berulang kembali terjadi di Bandung pada tahun 1978. Pelakuan-perlakuan berdarah dan anti kemanusiaan dalam operasi-operasi militer Timor-timur, peristiwa Tanjung Priok, Aceh, Iran, Maluku, Ternate sampai dengan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan dengan 'enak'-nya menggunakan istilah 'demi negara', bahkan dijadikan sebagai 'media' unjuk rasa yang pantas untuk mendapatkan penghargaan, jabatan tinggi sampai tertinggi didalam Negara Republik Indonesia tercinta ini. Mereka seolah-olah bisa berbuat apa saja dalam menindas bangsa dan negara Indonesia ini. Tanpa rasa salah dan sesal. Tidak ada satupun petinggi itu yang diseret ke mahkamah pengadilan negara seperti mereka meMahmilub-kan (Mahkamah Militer Luar Bisa) tokoh-tokoh G30S/PKI yang mereka anggap sebagai pendosa bangsa dan negara Indonesia. Sementara, dosa-dosa yang telah mereka perbuat terhadap bangsa dan negara Indonesia mereka coba tutupi dan tidak pernah di-mahkamah-kan sedikitpun.

Memang harus jadi pertanyaan besar dalam sejarah Indonesia merdeka, mengapa ABRI sepanjang hidupnya dalam Indonesia merdeka hampir selalu menempatkan diri sebagai musuh dari rakyat. Mungkin perlu suatu kajian psikologi yang sangat mendalam untuk memahami mengapa ABRI (TNI dan POLRI) dalam melakukan tugasnya senang sekali membuat jatuhnya korban berdarah di kalangan rakyat. Selalu menganalogikan posisinya sebagai pembela siapa pun pihak yang berkuasa dan bahkan sulit penjajah di Indonesia. Bila kita cermati, sangat sedikit catatan sejarah dari tindakan tentara colonial Belanda maupun polisi penjajahan Belanda yang menghadapi rakyat Indonesia dengan cara-cara kekerasan brutal dan berdarah-darah, padahal jelas visi dan misi mereka adalah untuk memusuhi dan menindas rakyat jajajahannya, tidak pernah kita temukan catatan

sejarah yang menunjukkan polisi penjajah Belanda mengawal acara pertandingan sepakbola atau pertunjukkan musik dengan menggebuki kejam beringas dan berusaha melukai penonton sampai berdarah-darah. Sementara, hampir di setiap kesempatan berhadapan dengan massa rakyat di negara Indonesia merdeka perlakuan TNI dan Polri (ABRI) dengan jelas sekali di televise menampilkan wajah garang, sombong, angkuh, ringan tangan, berusaha mencari kesempatan untuk melukai. Sebaliknya menghadapi massa dalam jumlah besar yang sulit untuk mereka atasi, mereka cenderung bersembunyi mengawasi dari kejauhan bahkan sedapat mungkin menghilang dari hadapan publik, sehingga hampir selalu kegiatan-kegiatan publik yang berbau massal akan dengan mudah berubah menjadi aksi anarki yang memakan darah dan harta benda rakyat tidak bersalah dan menjadi sasaran korban. Tampaknya banyak hal yang harus dibenahi dalam doktrin, visi, misi dan perilaku ABRI (TNI atau Polri) untuk bisa menjadi pilar yang mengayomi tumbuhnya rasa aman, tertib dan damai di hari rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

Psikologi Mahasiswa dan Aksi Kekerasan

Disadari atau tidak, sepanjang pengalaman mahasiswa di dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur hari nurani rakyat, semakin tumbuh perasaan tidak suka pada perilaku TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya kadang tidak menimbulkan rasa aman, tenteram, dan damai. Dalam setiap kesempatan menghadapi gerakan mahasiswa, TNI dan Polri selalu memprovokasi aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang sebenarnya mengusung gagasan-gagasan kritik konstruktif secara konseptual dan cendekia untuk digeser untuk menjadi aksi-aksi benturan fisik sehingga memungkinkan TNI dan Polri melakukan tindakan kekerasan, penyiksaan fisik bahkan sampai dengan pembunuhan langsung maupun tidak langsung. Dalam pengalaman aksi-aksi mahasiswa tahun 1970-1974 pada umumnya sangat kecil kemungkinan benturan fisik itu oleh karena ada kecenderungan para mahasiswa untuk menahan prestise dan harga dirinya untuk tidak berbenturan fisik dengan prajurit-prajurit rendahan dari kalangan TNI atau Polri. Bila diantisipasi akan terjadinya pengerahan prajurit dalam jumlah besar di lapangan sehingga memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan, maka dengan segera dan segala cara para tokoh pimpinan akan meng-call atasan-atasan dari prajurit-prajurit itu secara hierarkis untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu supaya tidak jatuh korban dari kedua belah pihak secara tidak bertanggung jawab.

Ada semacam kendala di kalangan petinggi-petinggi ABRI pada waktu itu untuk tidak menjatuhkan korban di antara para mahasiswa dan prajurit dengan bercermin pada bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap pasukan pengamanan Soekarno (Resimen Tjakrabirawa) yang dianggap bertanggung jawab terhadap terbunuhnya demonstran mahasiswa Arief Rahman Hakim di depan Istana Merdeka di samping juga ada kekhawatiran bahwa putra-putri mereka sendiri mungkin juga berada di tengah-tengah para mahasiswa yang sedang menyalurkan aspirasi hati nurani rakyat. Banyak sekali ceritera bagaimana pemimpin-pemimpin ABRI pada waktu itu yang bersilang pendapat dengan putra-putrinya di rumah yang lebih terpihak pada kesamaan gagasan dengan rekan-rekan mahasiswa di kampus, sehingga rela berhadapan di lapangan dengan pasukan-pasukan yang dipimpin orangtuanya. Harus diakui bahwa pada waktu itu di kalangan sebagian petinggi TNI dan Polri pun masih terlihat adanya toleransi terhadap pandangan politik, pandangan sosial, cita-cita dan harapan yang tidak diikat oleh disiplin mati, loyal, membebek pada otoritas atasan. Tampaknya hal itu berkait juga dengan sikap sempurna dan harus mengatakan “Mohon izin” bila akan melakukan sesuatu tanpa perintah atasan. Sikap khas tentara dan polisi Indonesia ini lebih menunjukkan penanaman sikap feodal daripada disiplin.

Melalui cara-cara “komunikasi” seperti itu hampir selalu bisa dihindari terjadinya bentrokan-bentrokan fisik dalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi melalui demonstrasi lebih sering dilakukan di dalam forum-forum diskusi dengan mendatangi pejabat-pejabat pemerintah yang berkepentingan atau melalui diskusi-diskusi yang dilakukan di dalam kampus dan dihadiri oleh pejabat-pejabat tersebut. Balai Pertemuan Ilmiah (BPI) ITB di perempatan jalan Surapati dan Dipati Ukur serta aula Universitas Padjadjaran di jalan Dipati Ukur sering menjadi ajang dari kegiatan-kegiatan semacam itu. Dewan-dewan perwakilan rakyat pusat maupun daerah bahkan seringkali merasa perlu diberikan suntikan keberanian melalui aktivitas mahasiswa semacam itu sebagai bahan barargumentasi dalam tugas pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Jacket mahasiswa dengan dasi yang dikenakan di dalamnya memang lebih menampilkan ciri intelektualitas di dalam penampilan maupun tutur kata perilaku sehingga menimbulkan respek dari kalangan pemerintah dan kredibilitas dari kalangan rakyat dan masyarakat luas. Kalimat-kalimat tajam dalam susunan bahasa yang

jernih, spontan tidak banyak basa-basi, tetapi menimbulkan rasa rih bagi yang merendahkan nilai dari gagasan maupun pandangan yang disampaikan. Tampaknya aksi-aksi mahasiswa intra kampus ini selalu berhasil memelihara harkat dan martabat serta kualitas perguruan tinggi yang mereka wakili. Aksi-aksi tidak senonoh dan sekadar mencari sorotan publik semata, vulgar dan tidak 'berpendidikan' lebih banyak dilakukan bukan dari kalangan ini. Namun pemerintah selalu meng-counter aksi-aksi mahasiswa intra semacam ini dengan memojkkan mereka dalam persepsi yang memprovokasi masyarakat untuk menempatkan dalam posisi yang sama. Dalam kenyataannya aksi kritis mahasiswa intra kampus Bandung hampir selalu berhasil menjaga jarak dengan aksi-aksi para mahasiswa ekstra kampus Bandung maupun Jakarta yang dipersepsikan sebagai aksi-aksi demonstrasi dengan motivasi pribadi atau kelompok kepentingan.

Aksi-aksi mahasiswa intra kampus Bandung pada umumnya lebih didasarkan pada konsep dan solusi. Berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan makro, bangsa, negara dan sangat menghindari isu-isu praktis, tendensius, berbau pemerasan. Aksi-aksi mahasiswa intra kampus Bandung umumnya ditujukan pada konsep dan solusi bagi perbaikan nasib rakyat, kritik terhadap penyimpangan kebijakan maupun pelaksanaannya dalam bidang politik, ekonomi, dwifungsi ABRI, korupsi, kolusi dan nepotisme yang mudali menggejaka, dan lain sebagainya. Leading issue yang dimunculkan misalnya adalah koreksi terhadap keberadaan lembaga-lembaga ekstra konstitusional seperti Aspri, Komkamtib, dan Laksus Kopkamtibda, Dwifungsi ABRI, hak-hak warganegara, demokratisasi. Lalu, koreksi terhadap perilaku economic animal dan penanam modal Jepang di Indonesia dan praktik-praktik antikulturalnya. Serta kritik terhadap strategi pembangunan trickle down effect yang menguatkan kolusi orang-orang dekat di sekitar Soeharto dengan pengusaha-pengusaha nonpri China yang rasialis, kesan penyimpangan bantuan luar negeri melalui IGGI yang dikorupsi dan hanya bermanfaat bagi segelintir elite, RUU Perkawinan, skeptisisme terhadap kemampuan Soeharto, dan lain sebagainya.

Dengan sendirinya misi gerakan mahasiswa intra kampus Bandung pada waktu itu tidak diarahkan sebagai suatu gerakan populis yang memprovokasi massa, tetapi lebih diarahkan sebagai advokasi terhadap kepentingan masyarakat luas dengan sedapat mungkin mengeliminasi unsur-unsur dalam kekuasaan pemerintahan Orde Soeharto yang

menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang disebutkan dalam leading issue itu. Kalau kemudian mahasiswa intra kampus di Jakarta melepaskan diri dari aksi semacam ini, bergerak ke arah provokasi terhadap masyarakat luas serta merangkul gerakan-gerakan demonstran ekstra kampus, tak pelak lagi terciptalah jarak yang membedakan dengan gerakan mahasiswa intra kampus Bandung. Ibarat air, aliran air bersih harus dijaga agar tidak tercampur dengan air kotor yang mengandung sampah. Sangat disayangkan bahwa sejarah Indonesia modern kemudian mencatat bahwa air jernih itu telah dikotori dengan air sampah dan akibatnya harus dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia selama 24 tahun karena sejak saat itu. Orde Soeharto memiliki argument legalities dan formalitis yang kuat untuk menindas kritis loyal dari mahasiswa kampus dan media massa (yang dilakukan melalui cara-cara intelektual, terbuka dan terhormat). Sejak itu hampir tidak pernah lagi muncul kritik-kritik membangun dan loyal. Pemerintahan Orde Soeharto dengan ABRI-nya benar-benar berkuasa sendirian sampai dengan kehancurannya akibat kekeroposan tulang-tulangnyanya. Djengis Khan pernah mengatakan bahwa tentara yang memerangi rakyatnya sendiri berarti sama dengan menggali kubur bagi tuannya!.

Penutup: Lima Kesimpulan

TERDAPAT beberapa hal yang dapat dipetik dari pengalaman terlibat di dalam gerakan mahasiswa Bandung tahun 1970-1974. Kelima hal tersebut adalah berikut ini.

1. Gerakan mahasiswa kampus akan selalu identik dengan gerakan nurani bangsa bilamana dilakukan oleh organisasi mahasiswa intra kampus yang membawakan ciri dan intelektualitas mahasiswa dari kampus-kampus perguruan tinggi bergengsi dan terkemuka. Membawakan nama dan prestise kampus perguruan tingginya tampaknya jauh lebih berharga dan bermartabat dalam gagasan dan perilakunya dibanding membawakan nama organisasi-organisasi ekstra kampus yang lebih bercorak kepentingan, kelompok, ideologi dan sekte. Membawakan representasi suara intelektual kampus lebih berdimensi kepentingan bersama seluruh bangsa, objektif dan intelektual. Sayang sekali, sejak diberangusnya kampus dan media massa setelah peristiwa Malari 1974, semakin redup pula sinar yang dipancarkan oleh mercusuar kampus sebagai obor kebenaran bagi

masyarakat sekitarnya. Sejak itu pula kebenaran hampir tidak pernah lagi dijadikan pegangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah Orde Soeharto sehingga jatuh terantuk berakhir membawa kepapaan bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Berakibat, Indonesia tidak pernah memunculkan tokoh terhormat di antara bangsa-bangsa seperti yang dimiliki Malaysia dengan Mahathir-nya, Singapura dengan Lee Kuan Yew-nya dan Afrika Selatan dengan Nelson Mandela-nya. Soeharto sebenarnya memiliki peluang emas seperti halnya juga dengan Soekarno, tetapi sayangnya mereka lebih tertarik untuk kepentingan jangka pendek melanggengkan kekuasaan dengan meniadakan suatu kebenaran. Hampir tidak ada pimpinan negarawan berkelas dunia tanpa mampu menjalin hubungan baik dengan suara-suara kritis, objektif, dan didasari kebenaran ilmiah yang dipancarkan oleh kalangan cendekiawan dan mahasiswa perguruan tingginya.

2. Untuk memelihara agar hati nurani bangsa tetap berada dalam representasi mahasiswa intra kampus perguruan tinggi, maka perlu pula dipelihara dan dikembangkan terus kebiasaan-kebiasaan mahasiswa intra kampus untuk melakukan analisis kritis, objektif, berani, spontan dengan cara-cara yang juga memperhitungkan posisi prestise, harkat dan martabat mahasiswa sebagai insan intelektual yang antikekerasan, sopan, cerdas serta mampu memelihara diri dari tindakan-tindakan kekerasan. Banyak media representasi penyaluran gagasan dan aspirasi bangsa yang perlu ditempuh disamping aksi-aksi demonstrasi terbuka yang rawan benturan fisik. Mahasiswa harus radikal dalam berpikir, tetapi sopan dalam perilaku. Sikap kritis tidak identik perilaku brutal anti kesopanan. Perilaku terdidik tidak akan menampilkan tingkah laku anti sopan santun. Aktivis mahasiswa tak harus selalu menjadi korban sia-sia. Dua rezim yang dibangun dari darah mahasiswa hanya tetap memperlakukan pengorbanan mahasiswa sebagai tumbal tanpa guna. (Rezim Soeharto dan Rezim Reformasi).
3. Mungkin hanya menjadi mimpi bagi bangsa dan negara Indonesia untuk memiliki TNI dan Polri yang santun, cerdas, bermartabat, dan bijak dalam ucapan maupun perilakunya dalam melindungi dan menumbuhkan rasa aman, terlindung dan terpelihara. Sayang sekali bahwa perilaku pimpinan-pimpinan puncak TNI dan

Polri di tingkat pusat maupun daerah lebih tampil sebagai pembawa kekuasaan yang memusuhi rakyat daripada pembela rakyat dan pelindung negara serta bangsa dari ancaman kekerasan. Bahkan dalam banyak kasus, provokasi ancaman terhadap rasa aman rakyat dan bangsa seringkali justru muncul dari kalangan ini. Entah kapan bangsa dan negara Indonesia dapat memperoleh keberuntungan memiliki TNI dan Polri yang bersikap matang.

4. Bangsa dan negara Indonesia sampai hari ini memang belum beruntung memiliki pemimpin-pemimpin andal, penuh dedikasi menimbulkan rasa bangga, demokratis, tidak mabuk kekuasaan, tidak lupa daratan, mencintai negara lebih dari mencintai keluarga dan sebagainya. Agaknya bangsa dan negara Indonesia perlu mencari dan menciptakan suatu sistem rekrutmen kepemimpinan bangsa dan negara yang memungkinkan munculnya pimpinan-pimpinan bangsa dan negara dari segala level kepemimpinan, politik, militer, pemerintahan, birokrasi yang benar-benar mampu memikul tanggung jawab kekuasaan negara yang bukan pemburu serta penikmat kekuasaan belaka.
5. Di atas segalanya dan untuk kepentingan semua itu, kampus perguruan tinggi dan gerakan mahasiswa intra kampus perguruan tinggi harus diupayakan agar selalu menjadi salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan itu. Hal ini harus diberikan penekanan, karena bukan tidak mungkin dari eksekutif-eksekutif yang terlihat hingga hari ini kampus-kampus perguruan tinggi terkemuka di Indonesia: UI, ITB, IPB, UGM, UNPAD, UNAIR, AMN, AAU, AAL, Akpol, STPDN, IIP sedang bisa dan akan menjadi sumber rekrutmen pemimpin-pemimpin negara yang korup, kolusif, nepotistik, berorientasi pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan dan penindas rakyat, jauh dari sifat-sifat idealistis, dedikatif, bersih, beribawa dan memajukan rakyat, bangsa serta Negara.

KEPUSTAKAAN:

- Altbach, Philip G.ed** : “Politik dan Mahasiswa: Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini“ Yayasan API. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1988
- Ahmaddani G Martha**: “Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa”. Indo Media Communication, 1992.
- Conde, Alexander De** : “Student Activism”, Voice of America Series, 1972
- Dhakidae, Daniel** : Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru” Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003
- Gilbert, Nigel** : “Researching Social Life”, Sage Publications, London, 2001
- Hatta Albanik** : ”Gerakan Mahasiswa; Gerakan Hati Nurani Bangsa”, dalam RUM ALY dkk; Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter; Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di... : Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia, 1970-1974 Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004
- Hatta Albanik, ed** : ”Perilaku Politik Menyimpang” Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung-Jatinangor Sumedang, 2005
- Kressel, Neil. J** : “Political Psychology”,
- Kellerman, Barbara** : ”Leadership: Multidisciplinary Perspectives”, Institute for Leadership Studies. Fairleigh Dickinson University, tanpa tahun
- Raillon, Francois** : “Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia”, LP3ES, Jakarta, 1985
- Robbins, Stephen P. Low, Peter S. Mourell, Mark. P.** “Managing Human Resources”, Prentice Hall, Australia, 2005
- Rum Aly** : “Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966“ Penerbit Kata Harta Pustaka, Jakarta 2006
- Vauhn, Graham M Hogg, Michael A.** “Social Psychology“, 3rd.ed Prentice Hall Australia, 2002